

History Articles Received: 20 February
2025 Accepted: 25 March 2025
Published: 30 Marc 2025

**ANALISIS PENGARUH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT TERHADAP
PERILAKU FISKAL PEMERINTAH DAERAH DI PULAU SUMATERA
PERIODE 2014-2023 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Bunga Eriyana¹, Muhammad Iqbal², Ghina Ulfah Saefurrohman³

¹²³Fakultaas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

E-mail: bungbun28@gmail.com

ABSTRACT

Balanced funds are funds sourced from APBN revenues allocated to each region to fund regional needs in order to implement fiscal decentralization. This study aims to analyze the effect of central government transfers on the fiscal behavior of local governments on the island of Sumatra from an Islamic economic perspective. The research period consists of 10 years, starting from 2014 to 2023. The population and sample of this study consist of nine provinces on the island of Sumatra, namely Lampung, South Sumatra, Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi, North Sumatra, West Sumatra, Aceh, and Riau. The data used comes from the Central Statistics Agency (BPS) and is analyzed using panel data regression. The results of the study indicate that DBH, DAU, DAK simultaneously have a significant effect on the fiscal behavior of local governments on the island of Sumatra.

Keywords: *Balanced funds, Local revenue*

ABSTRAK

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada setiap daerah guna mendanai kebutuhan daerahnya dalam rangka terlaksana desentralisasi fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transfer pemerintah pusat terhadap perilaku fiskal pemerintah daerah dipulau sumatera dalam perspektif ekonomi islam. Periode penelitian terdiri dari 10 tahun, mulai tahun 2014 hingga 2023. Populasi dan sampel penelitian ini terdiri dari sembilan provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, dan Riau. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistic (BPS) dan dianalisis menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH, DAU, DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perilaku fiskal pemerintah daerah dipulau sumatera.

Keyword : *Dana perimbangan, Pendapatan asli daerah*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Meski memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan pasar yang besar, ketimpangan pendapatan antar daerah dan masyarakat masih menjadi isu utama. Ketimpangan atau ketimpangan wilayah merupakan salah satu permasalahan yang tidak dapat dihindari dalam pembangunan. Ketimpangan

wilayah menjadi signifikan apabila wilayah dalam suatu negara terjadi pada berbagai potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia dan ikatan etnis atau politik. Salah satu cara untuk mengurangi ketimpangan wilayah adalah dengan menyelenggarakan pembangunan. Namun pembangunan tidak serta merta dapat mengurangi ketimpangan wilayah. Oleh karena itu, penting untuk mengemukakan konsep pemerataan dalam pembangunan di Indonesia.¹ Ketimpangan dapat dilihat tidak hanya dipengaruhi pertumbuhan pendapatan per-kapital saja namun dapat pula dipengaruhi oleh Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata seringkali mengakibatkan kesenjangan dalam akses terhadap layanan publik dan kualitas hidup, terutama di daerah-daerah terpencil. Dalam hal ini, peran pemerintah menjadi sangat penting untuk melakukan intervensi kebijakan. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah kebijakan fiskal, yang mencakup pengelolaan pendapatan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan yang berkelanjutan, serta distribusi pendapatan yang lebih adil. Kebijakan fiskal yang efektif dapat membantu mengatasi masalah ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian Lativa bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang di dalamnya memiliki keterkaitan dengan sistem perekonomian menggunakan mekanisme pemasukan dan pengeluaran anggaran pemerintah². Teori ekonomi mendiskripsikan kebijakan fiskal sebagai aktivitas pemerintah terkait pengumpulan penerimaan negara dan pembelanjanya.³

Pada tahun 2001 pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan fiskal daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dengan adanya sistem pengelolaan pemerintahan yang baru dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi (otonomi daerah). Pada pasal 9 UU No 23 2014 menyatakan bahwa kewenangan perilaku fiskal pemerintah daerah meliputi kewenangan *absolut* dan *relative*. Dalam menjalankan dan memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya pemerintah harus berusaha meningkatkan kemandirian keuangannya sendiri dengan cara meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Menurut pendapat Anggi Pratama Nasution dalam penelitiannya menyatakan bahwa Secara parsial pendapatan daerah berpengaruh signifikan

¹ Tulus Suryanto, Femei Purnamasari, Dan Mohamad Kurniawan, "Tax Revenue And Disparity: How To Improvement Income Inequality In Islamic Perspective," *Asian Journal Of Social Sciences And Management Studies* 5, No. 2 (2018): 65–71.

² Lativa S, "Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Perekonomian," *Jurnal Ekonomi* 23, No. 3 (2021): 161–75.

³ Ibid.

terhadap kemandirian keuangan daerah.⁴ Sedangkan, menurut penelitian Risca Yunia bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat⁵. Dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah, salah satu sumber penerimaan diantaranya pemungutan pajak daerah, retribusi dan penerimaan transfer dana dari pusat ke daerah. Pemberian kewenangan kepada perilaku fiskal pemerintah daerah ditujukan agar daerah menggali sumber daya yang ada sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pemberian transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah (dana perimbangan). Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada setiap daerah guna mendanai kebutuhan daerahnya dalam rangka terlaksana desentralisasi fiskal. Selain itu dana perimbangan juga bermanfaat dalam mengurangi kesenjangan fiskal antara wilayah.⁶ Sejalan dengan penelitian anggi pratama nasution menjelaskan bahawa pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat dan efisiensi belanja daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerahnya⁷. Dengan adanya transfer pemerintah pusat dan pelaksanaan pungutan pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan pelayanan publik serta akuntabilitas pemerintah daerah.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 mengatur mengenai hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah salah satunya pengelolaan transfer ke daerah/ TKD. Transfer dana antar pemerintah merupakan praktik yang biasa dan umum terjadi di suatu negara, tidak peduli dengan sistem pemerintahannya. Transfer dana tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah eksternalitas lintas daerah, memperbaiki sistem perpajakan, mengoreksi ketidakseimbangan skala, dan mewujudkan pemerataan skala antardaerah. Sejalan dengan teori Richard A. Musgrave dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia yang diatur dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah, dimana pengalihan dana ke daerah dilakukan dalam bentuk dana perimbangan memiliki mekanisme dan dampak yang signifikan dalam pengelolaan fiskal di Indonesia. DAU

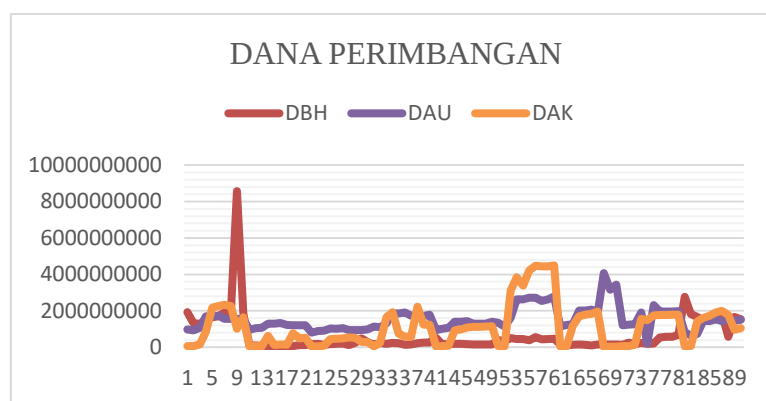
⁴ Anggi Pratama Nasution, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat Dan Efisiensi Belanja Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik* 9, No. 1 (26 November 2018): 192–206,.

⁵ Risca Yunia Lestari, Muhammad Ridwan, Dan Maryam Batubara, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kabupaten Langkat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 2 (22 Juli 2023): 2815, <https://doi.org/10.29040/Jiei.V9i2.9681>.

⁶ Risca Yunia Lestari, Muhammad Ridwan, Dan Maryam Batubara, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kabupaten Langkat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 2 (22 Juli 2023): 2815, *Hlm* 2

⁷ Nasution, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat Dan Efisiensi Belanja Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara."

dialokasikan secara umum kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan dasar dan meningkatkan pelayanan publik, berfungsi sebagai alat pemerataan yang membantu daerah dengan kapasitas pendapatan rendah, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar daerah. Dampak positif dari DAU termasuk peningkatan akses masyarakat terhadap layanan publik dan pembangunan infrastruktur di daerah kurang berkembang. Sementara itu, DAK ditujukan untuk sektor tertentu, seperti pendidikan dan kesehatan, dan bertujuan memuat proyek-proyek yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. DAK dapat mempercepat pembangunan di sektor-sektor yang kurang berkembang, meskipun seringkali terfokus pada proyek-proyek tertentu dan bukan untuk pengelolaan secara umum. Di sisi lain, DBH dibagikan berdasarkan kontribusi daerah terhadap pendapatan nasional, seperti pajak dan sumber daya alam, dengan prinsip keadilan yang memberikan insentif bagi daerah untuk meningkatkan potensi pendapatan mereka. Dampak dari DBH adalah peningkatan kemandirian keuangan daerah dan mendorong daerah untuk lebih aktif dalam mengelola sumber daya yang ada.



Grafik 1.1

Pendapatan Dana Perimbangan Di Pulau Sumatera Periode 2014-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, olah data 14 Januari 2025.⁸

Berdasarkan grafik 1.1 data yang diperoleh, diketahui bahwa terjadi peningkatan secara signifikan jumlah yang dialokasikan ke daerah untuk dana perimbangan, dimana peran DAU dalam dana perimbangan sangatlah menonjol, sedangkan peran DAK adalah yang terkecil terhadap dana perimbangan. Besarnya peran DAU dan juga DBH juga menunjukkan bahwa dalam era desentralisasi saat ini, pemerintah daerah memperoleh kepercayaan yang

⁸ "Badan Pusat Statistik," N.D., <https://www.bps.go.id/>.

sangat besar dalam penggunaan dana transfer dari pusat, mengingat bahwa penggunaan kedua jenis dana perimbangan tersebut sama sekali tidak diatur oleh pemerintah pusat.

Kebijakan fiskal pemerintah daerah merupakan langkah pemerintah dalam mengelola pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instrument fiskal untuk memengaruhi sistem ekonomi agar memaksimalkan kesejahteraan ekonomi. Perilaku Fiskal pemerintah daerah melalui salah satu kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang bertujuan untuk menstabilitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemandirian fiskal sendiri merupakan salah satu indikator utama dalam melihat tingkat kesejahteraan ekonomi. Transparansi dalam pengelolaan dana alokasi sangat penting untuk memastikan dana digunakan sesuai peruntukannya, sedangkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap penggunaan dana meningkatkan kepercayaan masyarakat. Evaluasi kebijakan fiskal yang dilakukan secara berkala juga diperlukan untuk menilai efektivitas penggunaan dana alokasi, analisis dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, dan perbaikan kebijakan di masa depan. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan kemandirian fiskal daerah dapat meningkat dan ketimpangan wilayah dapat diminimalkan, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Kemandirian fiskal merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri segala kegiatan otonomi daerah tanpa ketergantungan pada pemerintah pusat atau bantuan lainnya. Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi rasio PAD semakin tinggi kemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer. Perilaku fiskal pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh transfer dari pemerintah pusat. Menurut Asmaul aziz mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa transfer pemerintah pusat ke daerah berupa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.⁹ Dana perimbangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah sehingga dapat terlaksana pelayanan yang tersedia untuk masyarakat. Dalam penelitian tersebut pula membuktikan bahwa semakin besar dana transfer yang diberikan maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa transfer dari pemerintah pusat memiliki dampak signifikan terhadap perilaku fiskal pemerintah daerah, baik dalam hal pendapatan, pengeluaran, maupun pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengelola dana perimbangan yang diterima

⁹ Asmaul Aziz, "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur)," *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis* 11, No. 1 (1 April 2016).

secara efektif dan memaksimalkan penggunaannya. Perilaku fiskal daerah dapat diukur melalui pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari APBD. Kemandirian fiskal setiap daerah tercermin dalam PAD. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Anggi Pratama Nasution, Maria Sisilia, dan Lian Arke Makorowu menggunakan sampel yang lebih kecil dan periode yang lebih singkat, sementara penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan analisis yang lebih optimal terkait penerimaan dan belanja daerah dari PAD dan transfer pemerintah pusat di Pulau Sumatera, yang berdampak pada perilaku fiskal pemerintah daerah.

Pulau Sumatera adalah salah satu pulau terbesar keenam di dunia yang terletak di Indonesia, dikenal dengan berbagai nama seperti Pulau Percha, Andalas, Bumi Melayu, Suwarnadwipa, atau Pulau Emas. Meskipun indeks Gini tercatat sebesar 0,3, yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk berada dalam kategori rendah, indeks Gini ini adalah alat ukur untuk menilai ketimpangan pembagian pendapatan di antara penduduk suatu wilayah. Nilai indeks gini berkisar antara 0 hingga 1; semakin mendekati 1, ketimpangan pendapatan semakin tinggi. Namun, dengan indeks Gini 0,3, Pulau Sumatera menunjukkan ketimpangan pendapatan yang rendah. Hal ini berarti pemerintah daerah di Pulau Sumatera berupaya meningkatkan kemandirian fiskalnya, meskipun masih terdapat tantangan dalam proses tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pengaruh transfer dari pemerintah pusat terhadap perilaku fiskal pemerintah daerah. Perlu diketahui bahwa Pulau Sumatera terdiri dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kep. Riau, dan Kep. Bangka Belitung, yang memiliki kekayaan alam melimpah. Namun penelitian ini hanya mencakup sembilan provinsi: Sumatera Selatan, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Riau, dan Lampung, karena Provinsi Kep. Riau tidak memiliki data atau melakukan penginputan data di BPS. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transfer terhadap perilaku fiskal pemerintah daerah dengan menguji variabel DAU, DBH, dan DAK terhadap PAD sebagai indikator perilaku fiskal pemerintah daerah dalam periode 2014-2023 dari perspektif ekonomi Islam.

LANDASAN TEORI

Ekonomi Publik

Istilah “Ekonomi Publik” berasal dari dua kata, yaitu ekonomi dan publik. Ekonomi Merujuk pada aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan demi

kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Ilmu Ekonomi Publik, adalah cabang ilmu ekonomi yang menganalisis isu-isu ekonomi yang berkaitan dengan masyarakat dan pemerintah, seperti kebijakan subsidi dan pajak, regulasi/deregulasi, nasionalisasi/privatisasi, sistem jaminan sosial, ketahanan pangan, kebijakan teknologi, serta isu pendidikan dan kesehatan.¹⁰ Dapat disimpulkan Ekonomi Publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang mengkaji interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam aspek ekonomi, termasuk kebijakan subsidi, pajak, regulasi, dan sistem jaminan sosial.

Menurut Richard A. Musgrave, seorang ekonom publik terkemuka abad ke-20 yang saat ini menjabat sebagai Guru Besar Emeritus di Departemen Ilmu Ekonomi, Harvard University, AS, mengemukakan bahwa pemerintah memiliki tiga peran utama dalam perekonomian, yaitu stabilisasi, alokasi, dan distribusi.¹¹ Peran stabilisasi mencakup menjaga tingkat kerja penuh dan stabilitas harga, yang berhubungan erat dengan ekonomi makro. Dalam hal alokasi tersebut, pemerintah berusaha mengarahkan sumber daya melalui pengeluaran dan kebijakan pajak untuk mendorong pertumbuhan di sektor tertentu. Sedangkan peran distribusi berkaitan dengan keadilan ekonomi dan bagaimana produk yang dihasilkan didistribusikan ke masyarakat. Peran ketiga berhubungan dengan upaya pemerintah untuk mendistribusikan produk yang dihasilkan oleh masyarakat, meliputi isu-isu mengenai keadilan dan trade-off antara keadilan dan efisiensi. Ilmu Ekonomi Publik lebih fokus pada dua analisis terakhir dari tiga peran pemerintah menurut Musgrave. Dalam praktiknya, kegiatan pemerintah dalam melaksanakan peran-peran tersebut saling terkait, sehingga pemisahan peran menjadi tiga kategori sering kali sulit dilakukan dengan jelas. Misalnya, kebijakan subsidi bahan bakar di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk menjaga harga yang terjangkau bagi masyarakat, tetapi juga berdampak pada alokasi sumber daya, yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi dan stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Subsidi ini juga harus dipertimbangkan dalam konteks distribusi, karena dapat menciptakan ketimpangan jika manfaatnya tidak merata. Contoh lain adalah kebijakan pajak yang diterapkan pemerintah untuk mendukung pendidikan dan kesehatan. Pendapatan dari pajak digunakan untuk memuat program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus berfungsi sebagai alat untuk mendistribusikan kembali pendapatan. Dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga

¹⁰ Tri Wahyuningsih, *Ekonomi Publik* (Rajagrafindo Persada, 2020).

¹¹ Lestari, Ridwan, Dan Batubara, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kabupaten Langkat.", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 2 (22 Juli 2023): 2815.

sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial. Dalam konteks ekonomi Indonesia, aplikasi teori Musgrave sangat relevan. Intervensi pemerintah dalam perekonomian sering kali melibatkan pertimbangan yang kompleks antara efisiensi dan keadilan. Misalnya, ketika pemerintah memutuskan untuk menaikkan pajak bagi kelompok yang menempatkannya tinggi untuk memuat program sosial, mereka harus menyeimbangkan dampaknya terhadap insentif investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan memahami keterkaitan antara alokasi dan distribusi dalam konteks kebijakan publik, pembaca dapat memperoleh wawasan lebih mendalam mengenai tantangan dan strategi yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam menciptakan kesejahteraan yang merata.

Ekonomi public dalam perspektif ekonomi islam dipandang sebagai Kebijakan ekonomi publik sangat diperlukan dalam pemerintahan. Ekonomi Publik membahas pengelolaan pendapatan dan belanja negara (APBN). Apabila APBN tidak dikelola dengan baik atau tidak ditangani oleh ahlinya, maka akan mengalami kerugian yang signifikan. Seperti sabda *rasulullahi shallaallahu alaihi wasallam* ¹²

"Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu."

(HR Al-Bukhari).

Dalam hadits tersebut mempertegas ketika peran-peran penting di tengah masyarakat diberikan pada sosok yang tidak memiliki kompetensi dan keahlian dalam memimpin, mengelola dan mengurus maka kehancuran pun akan datang¹³. Berikut pendapatan negara dalam pandangan ekonomi islam: *Ghanimah* (harta rampasan perang yang didapat dari tawanan perang yang kalah dalam peperangan), *Fa'I* (pajak harta dari orang kafir yang bertempat tinggal dipemerintahan islam), *Jizyah* (pajak atas perlindungan diri bagi orang kafir yang hidup di negara islam), *Kharja* (pajak tanah dari orang kafir yang hidup dinegara islam), *Nawaib* (pajak untuk orang kaya muslim yang memiliki kelebihan harta diinfakkan untuk negara dalam rangka menutupi keuangan negara yang sedang devisa), *Wakaf* (memberikan sebagian harta dalam bentuk tahan lama zatnya kepada pengelola wakaf), *Zakat* (kewajiban orang islam untuk mensucikan hartanya), *Infak* (mengeluarkan harta dengan tujuan mendekatkan diri kepada allah), *Sedekah* (mengeluarkan harta materi atau nonmateri dari orang islam), *Ushr* (zakat pertanian/ bea cukai). Adapun tujuan pembelanjaan

¹² Ahda Segati, "Ekonomi Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (Jkues)* 5, No. 1 (21 Februari 2021): 1–10.

¹³ "Maksud Hadits 'Jika Perkara Diserahkan Pada Bukan Ahlinya, Tunggulah Kiamat,'" Diakses 21 Januari 2025

negara dalam ekonomi islam dipergunakan untuk: Pemenuhan kebutuhan, Pertahanan, Pelayanan administrasi, Keamanan social, Pendidikan, Pembangunan sarana dan prasarana

Kebijakan Fiskal

Kata fiskal berasal dari bahasa latin “*fiscus*”, bertujuan untuk menstabilkan perekonomian melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak). Kebijakan fiskal sendiri ialah konsep pengelolaan ekonomi yang dicetuskan oleh John Maynard Keynes. Keynes memperkenalkan kebijakan fiskal dalam buku *the general theory of employment, interest and money* pada tahun 1936. Kebijakan fiskal berdasarkan teori Keynes adalah peningkatan atau penurunan pendapatan (pajak) dan tingkat pengeluaran mempengaruhi inflasi, lapangan pekerjaan dan aliran uang melalui sistem ekonomi suatu negara. Pada negara Indonesia, kebijakan fiskal memiliki dua fokus utama yaitu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menangani masalah terkait APBN, Defisit APBN terjadi ketika pendapatan pemerintah lebih rendah dari pengeluarannya dan Mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro, yang mencakup pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, jumlah lapangan kerja atau kemiskinan, serta neraca pembayaran. Contoh Kebijakan fiskal berperan penting dalam perekonomian seperti pengendalian inflasi dan penciptaan lapangan kerja. Misalnya, dalam situasi inflasi yang tinggi, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran atau meningkatkan pajak untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, dalam kondisi resesi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran atau mengurangi pajak untuk merangsang permintaan dan menciptakan lapangan kerja. Ketika APBN mengalami defisit, pemerintah dapat memilih antara mencetak uang atau meminjam dari sumber domestik dan luar negeri. Opsi mencetak uang berisiko tinggi terhadap inflasi, sehingga pemerintah biasanya lebih memilih untuk meminjam. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, penerapan teori Keynes sangat relevan. Pemerintah sering menggunakan kebijakan fiskal untuk mengatasi masalah struktural ekonomi. Misalnya, program-program sosial dan infrastruktur yang dibiayai oleh APBN bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru. Kebijakan ini tidak hanya membantu menjawab kebutuhan mendesak, namun juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dalam perspektif ekonomi Islam, Kebijakan fiskal menurut ekonomi islam merupakan pelaksanaan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam suatu negara yang memiliki ciri khas dari nilai orientasi, dimensi etik dan social dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintahan islam. kebijakan fiskal memiliki dua instrument. Pertama: Kebijakan

pendapatan, yang tercermin dalam kebijakan pajak. Kedua: Kebijakan belanja (pengeluaran).¹⁴ Kedua instrument tersebut akan terlihat dalam anggaran belanja negara. Instrument kebijakan pendapatan (sumber penerimaan negara) terdiri dari zakat, kharja (pajak bumi/tanah pertanian), usyur (pajak perdagangan/bea cukai), jizyah (pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim), ghanimah (harta rampasan perang), khums, fai, kaffarat, dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal.

Transfer Pemerintah Pusat

Transfer pemerintah pusat adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal sedangkan Transfer antar pemerintah pusat dan daerah adalah proses pengalihan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau sebaliknya. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan public, Hal tersebut tertera dalam UU No.14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Transfer antar pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk anggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), DAK (Dana Alokasi Khusus), DAU (Dana Alokasi Umum), DBH (Dana Bagi Hasil), atau dalam bentuk pemberian subsidi atau bantuan langsung lainnya. Transfer antar pemerintah harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, serta dikelola dengan baik dan efisien. Selain itu, transfer antar pemerintah juga harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat diperiksa oleh lembaga-lembaga keuangan yang relevan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah, dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, PAD perlu terus ditingkatkan untuk menutupi sebagian beban pengeluaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang setiap tahunnya terus meningkat. Teori Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan penelitian zaenal arifin menjelaskan bagaimana pemerintah daerah menghasilkan uang dari sumber-sumber daerah yang berada diwilayahnya sendiri dan dihimpun dengan perundang-undangan daerah yang berlaku, seperti pajak, retribusi, dan hasil dari pengelolaan

¹⁴ Ihdi Aini, "Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17, No. 2, Hlm 45

kekayaan daerah.¹⁵ PAD sangat penting karena menunjukkan seberapa mandiri suatu daerah dalam hal keuangan, yaitu kemampuan daerah untuk membiayai pengeluaran sendiri tanpa bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula kemandirian fiskal daerah tersebut. Hal ini memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan.¹⁶

Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Fiskal di Indonesia

Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat dengan distribusi kekayaan yang seimbang, mengintegrasikan nilai-nilai materi dan spiritual. Dalam konteks ekonomi Islam, kebijakan fiskal diharapkan dapat melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, dengan mempertimbangkan dimensi etika dan sosial dalam pendapatan serta pengeluaran negara. Relevansi kebijakan fiskal di Indonesia tetap terjaga meskipun terdapat perbedaan budaya dan waktu dengan negara-negara Islam pada masa lalu, berkat doktrin syariah Islam yang dapat disesuaikan dengan hukum dan budaya lokal. Sumber penerimaan negara Islam seperti ghanimah tidak diterapkan di Indonesia, tetapi sumber lainnya telah diadopsi dengan mekanisme yang berbeda, meskipun dengan tujuan yang sama. Penerapan kebijakan fiskal di Indonesia meliputi¹⁷: Kharaj yang sebanding dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di mana Kharaj dikenakan pada tanah pertanian dan non-Muslim, sementara PBB berlaku untuk semua jenis tanah; 'Usyr yang mirip dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPn), yang mencakup barang dan jasa; serta Jizyah yang setara dengan Pajak Penghasilan (PPh), yang dikenakan pada semua individu berdasarkan pendapatan, dengan sistem progresif untuk meringankan beban masyarakat berpendapatan rendah. Jizyah juga berfungsi sebagai kompensasi bagi non-Muslim untuk layanan sosial dan keamanan, serta dapat dipahami sebagai pajak bagi jiwa warga asing yang tinggal di wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

¹⁵ Sulistia Dewi Irma Dan Huda Syamsul, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan," *Al-Buhuts* 19, No. 2 (2023).

¹⁶ Ramona Leny Gaghana, Paulus Kindangen, Dan Debby Ch Rotinsulu, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon Dan Koramobagu)," *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 19, No. 3 (2018): 52–66.

¹⁷ Moh Fitra Febriana dan Setia Mulyawan, "Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam Serta Relevansinya Di Negara Indonesia Moh Fitra Febriana Setia Mulyawan," *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (8 Mei 2024): 39–52, <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i2.885>.

Penelitian ini bersifat kuantitatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data panel dengan periode 2014-2023 yang berfokus pada sembilan provinsi di Pulau Sumatera antara lain: Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Aceh, Jambi, dan Riau. Variabel yang dianalisis meliputi variabel independen (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah). Berikut ditunjukkan uraian variabel penelitian.

Tabel 2.1 Deskripsi Variabel

Nama	Simbol	Pengukuran	Sumber
Dana Bagi Hasil	DBH	Jumlah DBH yang ada di pulau sumatera	Badan Pusat Statistik (BPS)
Dana Alokasi Umum	DAU	Jumlah DAU yang ada di pulau sumatera	Badan Pusat Statistik (BPS)
Dana Alokasi Khusus	DAK	Jumlah DAK yang ada di pulau sumatera	Badan Pusat Statistik (BPS)
Pendapatan Asli Daerah	PAD	Jumlah PAD yang ada di pulau sumatera	Badan Pusat Statistik (BPS)

Analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan program E-views¹² untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel indenpenden terhadap variabel dependen, baik secara individu (parsial) maupun bersamaan (simultan). Pengaruh dianggap signifikan jika $p\text{-value} < \alpha$ (0,05). Model ekonometrika yang digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen adalah:

$$PAD_{it} = \alpha + \beta_1 DBH_{it} + \beta_1 DAU_{it} + \beta_1 DAK_{it} + e_{it}$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistic Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Median	Maximum	Minimum	SD
PAD	90	21,531	21,658	22,749	20,149	0,668
DBH	90	19,581	19,212	22,871	17,649	1,084
DAU	90	21,069	21,058	22,127	19,143	0,415
DAK	90	20,028	20,667	22,225	15,588	1,588

Tabel 3. 1 Hasil Statistik Deskriptif

Sumber: Penulis, data diolah (Eviews12) 2025

Tabel 3.1 menyajikan statistic deskriptif Sembilan Provinsi di Pulau Sumatera antara lain: Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Aceh, Jambi, dan Riau pada periode 2014-2023. Pendapatan asli daerah memiliki nilai minimum 20,149, maksimum 22,749, rata-rata 21,531, dan standar deviasi 0,668. karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi, maka data tersebar merata. Standar deviasi mencerminkan penyimpangan, sehingga distribusi data cenderung normal dan bebas dari bias. Selanjutnya, DBH memiliki nilai minimum 17,649, maksimum 22,871, rata-rata 19,581, dan standar deviasi 1,084. karena nilai rata rata lebih besar dari nilai standar deviasi maka data tersebar merata. kemudian variabel DAU memiliki nilai minimum 19,143, maksimum 22,127, rata-rata 21,069, dan standar deviasi 0,415. karena nilai rata rata lebih besar dari nilai standar deviasi maka data tersebar merata. Terakhir variabel DAK memiliki nilai minimum 15,588, maksimum 22,225, rata-rata 20,028, dan standar deviasi 1,588. karena nilai rata rata lebih besar dari nilai standar deviasi maka data tersebar merata.

Hasil Regresi Data Panel

Dalam mengestimasi parameter data panel, terdapat beberapa metode yang digunakan yaitu *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*. Ketiga metode estimasi data panel pada dasarnya dapat dipilih berdasarkan kondisi penelitian dengan menggunakan beberapa uji.¹⁸

Tabel 3.2 Hasil Regresi Data Panel

Variabel	Probabilitas	Keterangan
Uji chow	0,000	Ho ditolak, <i>fixed effect</i> lebih baik
Uji hausman	0,000	Ho ditolak, <i>fixed effect</i> lebih baik

Sumber: Penulis, data diolah (Eviews12) 2025

Berdasarkan tabel 3.2, hasil menunjukkan model terbaik untuk penelitian ini yaitu *fixed effect model*.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3.3

Hasil Uji

Variabel	DBH	DAU	DAK
DBH	1,000000	0,042580	0,281974
DAU	0,042580	1,000000	0,334186
DAK	0,281974	0,334186	1,000000

Multikolinearitas

Sumber: Penulis, data diolah (Eviews12) 2025

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, menyatakan bahwa nilai korelasi harus lebih kecil dari pada 0,90. Apabila lebih kecil dari 0,90 maka dinyatakan terbebas dari multikolienaritas atau lolos dari uji multikolienaritas. Berdasarkan tabel 3.3 nilai Koefisien korelasi DBH dan DAU sebesar $0,042580 < 0,90$, DBH dan DAK sebesar $0,281974 < 0,90$ dan DAU dan DAK sebesar $0,334186 < 0,90$. Maka dapat disimpulkan bahwa terbebas dari multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas.

¹⁸ Iqbal Firman Alamsyah Et Al., "Analisis Regresi Data Panel Untuk Mengetahui Faktor Yang Memengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Di Kalimantan Timur," *Prosiding Seminar Nasional Matematika Dan Statistika* 2 (30 Mei 2022),

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	T-Statistic	Probability
C	-1,359	0,177
DBH	1,961	0,053
DAU	0,151	0,879
DAK	-0,989	0,921

Sumber: Penulis, data diolah (Eviews12) 2025

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 3.4, Dalam data panel yang umum digunakan yaitu hetero regresid, standarnya nilai *Probability* > 0,05. Dapat Dilihat Nilai *Probability* DBH, DAU dan DAK > 0,05 Maka terbebas dari nilai Heteroskedastisitas

Hasil Penelitian

Variabel	Koefisien	T-Statistik	Probabilitas	Keterangan
C	14,892	8,520	0,000	
DBH	0,125	2,004	0,048	H1 : diterima
DAU	0,159	2,220	0,029	H2 : diterima
DAK	0,041	2,504	0,014	H3 : diterima
R-squared		0,913		
Adjusted R-squared		0,900		
F-statistik		74,632		
Prob (F-statistik)		0,000		

Tabel 3.5 Hasil Penelitian

Sumber: penulis, data diolah (eviews12) 2025

Berdasarkan tabel 3.5, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku fiskal pemerintah daerah dipulau sumatera.

Dana bagi hasil memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perilaku fiskal pemerintah daerah pada Sembilan provinsi di Pulau Sumatera periode 2014-2023 yang menjadi fokus penelitian. Artinya peningkatan dana bagi hasil berpengaruh pada karakteristik perilaku fiskal pemerintah daerah dalam mengalokasi dana transfer yang diberikan pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi publik, dimana alokasi sumber daya dapat mempengaruhi perilaku fiskal pemerintah daerah, mendorong mereka untuk meningkatkan investasi pada proyek-proyek yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil studi ini sejalan dengan Penelitian Lian Arke yang menyatakan bahwa DBH memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mengindikasikan bahwa daerah yang menerima DBH akan lebih aktif dalam mengelola sumber daya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku fiskal pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan dana alokasi umum berperan penting dalam pemerataan keuangan daerah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara kebutuhan fiskal dengan potensi ekonominya. DAU adalah dana yang diciptakan dari keuntungan APBN dan disalurkan untuk mendistribusikan sumber keuangan antar daerah secara merata guna mendukung kebutuhan daerahnya pada saat pemberlakuan desentralisasi fiskal. Hal ini sejalan dengan penelitian Maria Sisilia yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang antara tahun 2010-2019.¹⁹ Hal ini diperkuat oleh penemuan Sulistia Dewi Irma yang menunjukkan bahwa DAU dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, DAU berperan penting dalam perilaku fiskal pemerintah daerah, memungkinkan alokasi anggaran yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.²⁰

Dana Alokasi Khusus menunjukkan bahwa memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku fiskal pemerintah daerah, Artinya naik turunnya dana alokasi khusus berpengaruh pada perilaku fiskal pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus adalah mekanisme transfer keuangan yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan khusus dan

¹⁹ Maria Sisilia Dan Harsono Harsono, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Malang Tahun 2010- 2019," *Journal Of Regional Economics Indonesia* 2, No. 1 (10 Agustus 2021): 57–70,

²⁰ Sulistia Dewi Irma Dan Huda Syamsul, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan."

pembangunan infrastruktur daerah seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor lainnya. Hal ini didukung oleh Teori yang dikemukakan Farhan Kresna Pramudya dalam penelitiannya menjelaskan bahwa DAK dialokasikan dari APBN untuk memenuhi urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Hal ini sejalan dalam Penelitian Lian Arke juga menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya DAK, pemerintah daerah dapat memfokuskan anggaran pada proyek-proyek prioritas yang tidak hanya mendukung infrastruktur pembangunan tetapi juga mengurangi ketimpangan pertumbuhan antar daerah, sehingga berkontribusi pada perilaku fiskal yang lebih baik.²¹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hasil regresi data panel menggunakan *model fixed effect* menunjukkan bahwa secara simultan, variabel Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku fiskal pemerintah daerah di Pulau Sumatera. Secara parsial, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh terhadap perilaku fiskal, di mana setiap alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi di pemerintah daerah, asalkan alokasi sumber daya tersebut dimanfaatkan secara optimal. Lebih lanjut, variabel independen yang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK mampu menjelaskan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam perilaku fiskal pemerintah daerah di Pulau Sumatera sebesar 90,0996%, sedangkan sisanya sebesar 9,9004% (100 - nilai *customized R-square*) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Sebagai saran kontribusi, peneliti menyarankan agar pemerintah daerah lebih efektif dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana yang diterima, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam pembangunan daerah. Misalnya, pemerintah daerah dapat menerapkan sistem pelaporan yang lebih terbuka, di mana laporan penggunaan dana dipublikasikan secara berkala dan dapat diakses oleh publik. Selain itu, audit yang lebih ketat dan independen dapat dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan terhadap penggunaan anggaran. Penekanan pada evaluasi rutin terhadap dampak transfer dana juga merupakan

²¹ Mokorowu, Rotinsulu, Dan Engka, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Bagi Hasil (Dbh), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara."

langkah penting. Untuk melakukan evaluasi ini, peneliti merekomendasikan penggunaan indikator tertentu, seperti peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan tingkat kesejahteraan, dan penurunan angka kemiskinan. Metode evaluasi dapat mencakup survei masyarakat, analisis data statistik sebelum dan setelah penerimaan dana, serta studi kasus-kasus yang mendalam mengenai proyek-proyek yang dibiayai oleh dana tersebut. Dengan cara ini, pemerintah dapat memastikan bahwa dana transfer benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

Mengingat keterbatasan penelitian ini, disarankan agar penelitian lebih lanjut memperluas cakupannya dengan memasukkan variabel lain, seperti fenomena flypaper effect, serta memperpanjang jangka waktu penelitian dan memanfaatkan data dengan akurasi lebih tinggi untuk analisis yang lebih komprehensif.

DAFTAR RUJUKAN

- Aini, Ihdi. "Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17, No. 2 (25 Desember 2019). <https://doi.org/10.32694/010760>.
- Aziz, Asmaul. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur)." *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis* 11, No. 1 (1 April 2016). <https://doi.org/10.26533/Eksis.V11i1.34>.
- "Badan Pusat Statistik," N.D. <https://www.bps.go.id/>.
- Febriana, Moh Fitra, Dan Setia Mulyawan. "Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam Serta Relevansinya Di Negara Indonesia Moh Fitra Febriana Setia Mulyawan." *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (8 Mei 2024): 39–52. <https://doi.org/10.61132/Nuansa.V2i2.885>.
- Firman Alamsyah, Iqbal, Rut Esra, Salwa Awalia, Darnah Andi Nohe, Jurusan Matematika, Dan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam. "Analisis Regresi Data Panel Untuk Mengetahui Faktor Yang Memengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Di Kalimantan Timur." *Prosiding Seminar Nasional Matematika Dan Statistika* 2 (30 Mei 2022). <https://jurnal.fmipa.unmul.ac.id/index.php/snmsa/article/view/861>.
- Lativa S. "Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam

- Meningkatkan Perekonomian.” *Jurnal Ekonomi* 23, No. 3 (2021): 161–75.
- Leny Gaghana, Ramona, Paulus Kindangen, Dan Debby Ch Rotinsulu. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon Dan Koramobagu).” *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 19, No. 3 (2018): 52–66.
- Lestari, Risca Yunia, Muhammad Ridwan, Dan Maryam Batubara. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kabupaten Langkat.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 2 (22 Juli 2023): 2815. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9681>.
- “Maksud Hadits ‘Jika Perkara Diserahkan Pada Bukan Ahlinya, Tunggulah Kiamat.’” Diakses 21 Januari 2025. <https://nu.or.id/ilmu-hadits/maksud-hadits-jika-perkara-diserahkan-pada-bukan-ahlinya-tunggulah-kiamat-nw6cz>.
- Mokorowu, Lian Arke, Debby Ch Rotinsulu, Dan Daisy S M Engka. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Bagi Hasil (Dbh, Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara.” *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 21, No. 04 (2020).
- Nasution, Anggi Pratama. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat Dan Efisiensi Belanja Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara.” *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik* 9, No. 1 (26 November 2018): 192–206. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/375>.
- Segati, Ahda. “Ekonomi Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (Jkues)* 5, No. 1 (21 Februari 2021): 1–10. <https://doi.org/10.56184/jkues.v5i1.125>.
- Sisilia, Maria, Dan Harsono Harsono. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Malang Tahun 2010- 2019.” *Journal Of Regional Economics Indonesia* 2, No. 1 (10 Agustus 2021): 57–70. <https://doi.org/10.26905/jrei.v2i1.6182>.
- Sulistia Dewi Irma, Dan Huda Syamsul. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana

Alokasi Umum Dan Dana Alokasikhusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan.” *Al-Buhuts* 19, No. 2 (2023).

Suryanto, Tulus, Femei Purnamasari, Dan Mohamad Kurniawan. “Tax Revenue And Disparity: How To Improvement Income Inequality In Islamic Perspective.” *Asian Journal Of Social Sciences And Management Studies* 5, No. 2 (2018): 65–71.
<https://doi.org/10.20448/Journal.500.2018.52.65.71>.

Wahyuningsih, Tri. *Ekonomi Publik*. Rajagrafindo Persada, 2020.